



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKIM SUPANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **723817**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.589.788.000

1. Tanah Seluas 744 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 47.616.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/300 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 131.912.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 12.690.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 302.860.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
6. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 33.950.000
7. Tanah Seluas 1.570 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 100.480.000
8. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 11.480.000
9. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 23.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

16.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.



2.500.000

2. MOTOR, YAMAHA FREE GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 264.927.600

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.883.715.600

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.883.715.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZWAR FAHRIZAL ISROFULLAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 859564

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 107.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/33 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.011.317

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 112.011.317

III. HUTANG Rp. 161.936.618

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -49.925.301

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULI SETIAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 102431

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.781.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/64 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.781.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 452.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT 150 ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
4. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5L RS CVT Tahun 2022, LAINNYA Rp. 182.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.105.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.755.677

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.294.860.677

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.194.860.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA****UNIT KERJA :
PERTANIAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUDI PERMANA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000811

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	
5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.120.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	23.120.000
III. HUTANG	Rp.	12.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.120.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRIH
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 927848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	212.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.700.000
1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.335.869
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	220.535.869

III. HUTANG **Rp.** **168.256.992**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **52.278.877**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 716472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	212.000.000
1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI		
Rp. 212.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.300.000
1. MOTOR, HONDA C1MO2N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	188.518.104
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	410.818.104
III. HUTANG	Rp.	146.863.670
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	263.954.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.